

Judul : Perbanyak Kawasan Industri Daerah Dong  
Tanggal : Sabtu, 24 Juni 2023  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 6

## Pemerataan Ekonomi Nasional

# Perbanyak Kawasan Industri Daerah Dong

Senayan mendukung rencana Pemerintah melahirkan banyak kawasan industri di luar Jawa. Kawasan industri ini nanti diharapkan memberi nilai tambah bagi perekonomian negara dan *multiplier effect* seluas-luasnya bagi pemerataan ekonomi di Jawa dan luar Jawa.

ANGGOTA Komisi VII DPR Bambang Patijaya menuturkan, pembangunan kawasan industri ini akan mendorong hilirisasi dan mempercepat proses industrialisasi terhadap kekayaan sumber daya alam.

Sudah saatnya Indonesia memiliki ekosistem yang mengarah

pada pengembangan kawasan nasional yang tersebar di luar Pulau Jawa.

"Kita ingin ekonomi tidak sekadar komoditas, tapi juga berbasis pengolahan. Karena itu, kawasan industri ini menjadi penting," kata Bambang di Gedung Parlemen, Senayan,

Jakarta, kemarin.

Anggota Fraksi Golkar ini menuturkan, China termasuk negara yang terbilang sukses mengolah kawasan industri. Industrinya menyerupai suatu kampung penyedia bahan mentah. Ketika masuk ke pabrik besar, bahan mentah ini menjadi berbagai produk. Uniknya, limbahnya dimanfaatkan seefisien mungkin untuk memastikan tidak ada sisa dari bahan material tersebut.

"Kita ingin mendorong bagaimana menimbulkan ekosistem *supply chain* pengembangan suatu produk. Jika *raw*

*material*-nya adalah nikel, produk turunannya itu bisa dikembangkan," jelasnya.

Namun sayang, Bambang melihat, pertumbuhan kawasan industri ini belum mendukung dari sisi kebijakan fiskal. Regulasi yang ada belum mencerminkan situasi perekonomian global. Pasalnya, Indonesia juga masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

"Kasih Pak Menperin (Menteri Perindustrian). Kita kasih target tapi regulasi fiskal tidak mendukung," ujarnya.

Hal ini terkadang memunculkan tuduhan seakan-akan

Kemenperin tidak mengakselerasi tumbuhnya industrialisasi. Padahal sebenarnya, masalah ini muncul dari ego sektoral antar kementerian/lembaga.

Dia lalu menuding kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 11 persen yang tidak pro terhadap industrialisasi.

"PPh itu sangat tidak masuk akal jika dibebankan pada barang-barang *intermediate*. Harusnya, untuk bahan pengolahan lanjutan tidak boleh. PPh itu harus dipungut di ujung, sehingga barang-barang kita memiliki nilai kompetitif," ujar politisi asal Bangka Belitung ini. ■ KAL